

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adam, Muhammad, Ilmu Pengetahuan Notariat, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Adjie, Habib, Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- _____. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris, Pustaka Zaman, Semarang.
- _____, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), Cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _____, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- _____, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- A, Kohar. Notariat Berkomunikasi, Alumni, Bandung, 1984.
- Alexander, Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Magister Kenotariatan Univeristas Andalas, Padang, 2012.
- Budiono, Herlien, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- _____, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Dja'is, Mochammad dan RMJ.Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Acara Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- _____, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hasan, A. Madjedi, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- HS, Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kansil, Cst. et al, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
- Kie, Tan Thong, Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lubis, Surawardi, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana Press, Jakarta, 2009.

- Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Martokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Moeliono, Anton M. et al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- Munte, Hardi. Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, Pusantara, Jakarta, 2017.
- Naja, Daeng, H.R, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Notodisoerjo, Soegondo. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, Internusa, Jakarta, 1986.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Cetakan Pertama, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1982.
- Raharjo, Sajipto. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1984.
- Reksodipuro, Mardjono. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan & Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

- Rasjidi, Lili, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, 2009.
- Salam, Moch Faisal, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996.
- Setiawan, Wawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, Media Notariat, Edisi Mei ñ Juni 2004.
- Schaffmeister, D, Keijzer, E. dan PH. Sotorius, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Shanti, Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Situmorang, Viktor M dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soejono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soerodjo, Irawan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2012.
- Subekti, R dan Tirtosudibio, Kamus Hukum, Pradnya, Jakarta, 1980.
- Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Kedua Puluh Delapan, Intermedia, Jakarta, 2006.
- Subekti, R, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

Syaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Tahir, Hadari Djanawi, Pokok-pokok Pikiran Dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1981.

Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.

Thamrin, Husni, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Cetakan Kedua, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Tobing, GHS Lumban, Notaris Bicara Soal Kenegaraan, Watampone Pers, Jakarta. 2003.

_____, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1983.

Waluyo, Bambang. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Jurnal

Agraperta, Septinierco, Amzulian Rifai, dan Anna Sagita, “Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Ilmiah Repertorium*, Vol. 5, Mei 2016. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya: 61.

Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Di Bidang Kenotariatan.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18. No.1, April 2016. Aceh: Universitas Syiah Kuala: 38-39.

Lumaria, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4, No.1, 2015: 5.

Yuanitasari, Deviana, “Peran Notaris Publik dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kontrak Standar untuk Konsumen Indonesia” *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1. Issue 2, Juli 2017: 180.

Majalah

Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, “RENVOI No.28/Th.III/September2005”, *Jurnal Renvoi Mediatama*, Jakarta, 2005.

Wawancara

Anjar Wibowo, wawancara dengan penulis, Kantor Notaris, Singkawang, 04 Juni 2021.

Jimmy, wawancara dengan penulis, Kantor Kepolisian Resor Kota Singkawang, 07 Juni 2021.

Sarwono. wawancara dengan penulis, Kantor Majelis Pengawas Daerah, Singkawang, 04 Juni 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor B/46/VIII/2018 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris